



Kotak Pos 100

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
BUKIT BARISAN**

Komplek BLPP, Jl. Raya Padang – Indarung Km. 8 Padang Telp. (0751) 7740629 Fax. (0751) 7740766
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>
E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nomor : 522.4/021/KPHL BB-2019



SATKER/SKPD	: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT ESELON II/III	: UPTD KPHL BUKIT BARISAN
KPA	: BAMBANG SUYONO, S.Hut., MM
PROGRAM	: PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
KEGIATAN	: PENYIAPAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN NAGARI, HUTAN TANAMAN RAKYAT DAN KEMITRAAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KPH BUKIT BARISAN
CAPAIAN PROGRAM	: PERSENTASE LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT
KELUARAN	: JUMLAH KELOMPOK/LEMBAGA MASYARAKAT YANG DIFASILITASI DALAM PENYIAPAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN NAGARI, HUTAN TANAMAN RAKYAT DAN KEMITRAAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KELOLA KPH BUKIT BARISAN YANG TERUSULKAN
HASIL (OUTCOME)	: LUAS IZIN PENGELOLAAN HUTAN OLEH KELOMPOK/ MASYARAKAT
VOLUME	: 4 (EMPAT)
SATUAN UKUR	: KELOMPOK
DPA-SKPD	: DPA-SKPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR REKENING 2.00.04.2.00.04.01179.011.5.2
NILAI	: Rp. 63.040.000,- (ENAM PULUH TIGA JUTA EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

T.A 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYIAPAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN NAGARI, HUTAN TANAMAN
RAKYAT DAN KEMITRAAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KELOLA
KPH BUKIT BARISAN
TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

Merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017, UPTD KPHL Bukit Barisan merupakan UPT di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang. Untuk melaksanakan teknis operasional dan teknis penunjang di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, UPTD KPHL Bukit Barisan melaksanakan salah satu tupoksi perhutanan sosial dan kemitraan melalui Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-II/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- g. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit

Barisan (Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas ± 86.511 (delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas) hektar;

- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
- k. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
- l. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah KPH Bukit Barisan Nomor 2.00.04.2.00.04.01179.011.5.2

2. Gambaran Umum

Pembangunan hutan dan kehutanan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan secara arif dan bijaksana. Hutan sebagai sumber daya alam memiliki manfaat yang dapat mendorong perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat disekitarnya. Namun dengan kemajuan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di segala bidang pembangunan telah menyebabkan tekanan sosial ekonomi tersendiri terhadap keberadaan kawasan hutan. Tekanan tersebut cenderung berlebihan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan yang dapat menurunkan

produktifitas lahan hutan tentunya dapat mengakibatkan terganggunya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Kebutuhan masyarakat akan hasil hutan mengalami peningkatan sejalan dengan penambahan penduduk dan kemajuan industri berbasis kehutanan. Akibat dinamika sosial ekonomi dalam pembangunan hutan, terjadi friksi antara masyarakat dan Negara dalam hal penguasaan lahan hutan. Masyarakat merasa selama ini akses sosial ekonomi mereka terhadap lahan hutan dibatasi oleh kepentingan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, izin pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dapat diberikan kepada masyarakat setempat, baik secara individu maupun kelompok dalam rangka memberikan akses pemanfaatan hutan yang lebih luas pada masyarakat setempat untuk peningkatan kesejahteraan yang lebih nyata melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Pengembangan HKm, HN, HTR, HA dan Kemitraan Kehutanan adalah salah satu kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui pemberian akses yang lebih luas terhadap pemanfaatan hutan yang dalam implementasinya di tingkat lapangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kapasitas pengelola terutama pengurus kelompok/lembaga Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, untuk itu upaya penyiapan perhutanan sosial menjadi kunci keberhasilan implementasi PHBM.

Agar pelaksanaan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terlaksananya Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penjagaan dan pemanfaatan hutan secara efektif dan efisien.

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan adalah meningkatkan persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.

B. TARGET/SASARAN PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat dari Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan adalah :

1. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan (Hutan Lindung, dan Hutan Produksi).
2. Kelompok Masyarakat maupun Lembaga yang sedang dalam proses pengurusan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan maupun yang sudah memperoleh perizinan skema tersebut.
3. Instansi terkait penerima manfaat Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat Dan Kemitraan Kehutanan, yaitu:
 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Agam Kuantan;
 - Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Inderagiri Rokan;

- Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru;
- Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- Sub Bagian Program Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (SKPD lain yang terkait, seperti Bappeda, Dinas UMKM, Koperasi dan Perdagangan dan Dekranasda);
- Pemerintah Kabupaten/Kota pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (SKPD yang terkait seperti Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, Koperasi dan Perdagangan);

C. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- b. Satker/SKPD : UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- c. KPA : Bambang Suyono, S.Hut, MM

D. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan dilakukan melalui metode yaitu :

- a. Wawancara tidak terstruktur dengan masyarakat dan tokoh-tokoh kunci didalam masyarakat, perangkat nagari dan Lembaga Nagari terkait.
- b. Pertemuan/FGD bersama Kelompok Masyarakat maupun Lembaga Pengelola Hutan Nagari.
- c. Kunjungan/pemeriksaan lapangan.

2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan dilaksanakan dalam beberapa tahap tergantung pada proses yang sedang berjalan pada lokasi/nagari tempat pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

1. Penyiapan Bahan Administrasi

- a. Surat Keputusan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja dan Petunjuk Pelaksana. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan yang dilampirkan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Penyelesaian administrasi belanja bahan habis pakai, Belanja Jasa Kantor, Belanja cetak dan penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman dan Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan rincian item pelaksanaan kegiatan;
- c. Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada pelaksana sub kegiatan Fasilitasi Penyiapan Usulan Kemitraan, Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan/Kerja, dan Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
- d. Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Gubernur/Pejabat Berwenang lainnya pada pelaksanaan sub kegiatan Sinkronisasi dan Pengusulan Proposal Perhutanan Sosial Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Penyiapan alat dan pengadaan bahan

Penyiapan alat dan pengadaan bahan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang berupa alat tulis, alat transportasi, dokumentasi (surat-

surat dan peraturan terkait) dan lain-lain, sedangkan bahan berupa bahan habis pakai seperti bahan bakar minyak, bahan peraga dan lain-lainnya.

3. Pelaksanaan yang meliputi :

- Fasilitasi dan Bimbingan Teknis : proses ini dilakukan pada unit pengelola mulai dari yang belum mengusulkan sampai pada yang sudah memperoleh perizinan.
- Fasilitasi perizinan : proses ini dilakukan untuk tahap verifikasi perizinan maupun pada lokasi-lokasi yang mempunyai kendala terhadap persyaratan perizinan
- Monev dan pengendalian : dilakukan terhadap KPH yang mempunyai progress perhutanan sosial.
- Fasilitasi penyiapan usulan, fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan/kerja serta pembinaan dan pengembangan usaha dilaksanakan oleh KPH

4. Pelaporan

Penyusunan laporan akhir dilakukan setelah Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan selesai dilaksanakan. Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format :

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil
- E. Sumber Dana

II. METODE PELAKSANAAN

III. HASIL PELAKSANAAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

3. Pencapaian Keluaran

Keluaran dari Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan 1 (satu) Penyiapan, 2 (dua) Pembinaan, dan 1 (satu) Pengembangan.

4. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan I s/d IV dengan waktu efektif Februari-November 2019 sebagaimana *lampiran 2*.

5. Pembiayaan

Biaya yang diperlukan adalah sebesar 63.040.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Nomor : 2.00.04.2.00.04.01179.011.5.2 dengan Rincian Anggaran Biaya sebagaimana *lampiran 1*.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Tahun 2019. Kerangka acuan Kerja ini akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kelemahan didalamnya sehingga lebih baik dan bermanfaat.

Padang, 31 Januari 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



BAMBANG SUYONO, S. Hut, MM
NIP.19720907 199903 1 002

Lampiran 1 : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan

Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Tahun Anggaran 2019

Nomor : 522.4/021/KPHL BB-2019

Tanggal : 31 Januari 2019

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) KEGIATAN

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5 2	BELANJA LANGSUNG				63,040,000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				63,040,000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				5,276,000
5 2 2 01 0001	Belanja Alat Tulis Kantor				1,637,000
	- Kertas A4	10	Rim	49,000	490,000
	- Kertas F4	10	Rim	51,000	510,000
	- Tinta Data Print	10	Buah	36,500	365,000
	- Spidol	25	batang	10,300	257,500
	- Kertas peraga/koran	29	Lembar	500	14,500
5 2 2 01 0006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas				3,639,000
	- BBM Perjalanan Dinas	1	Ls	3,639,000	3,639,000
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				15,750,000
5 2 2 03 0020	Belanja Transportasi				15,750,000
	- Transportasi peserta fasilitasi penyiapan usulan kemitraan di KPHL Bukit Barisan	105	OT	75,000	7,875,000
	- Transportasi peserta fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan/kerja HKM, HN, HTR dan Kemitraan di KPHL Bukit Barisan	105	OT	75,000	7,875,000
5 2 2 06	Belanja Penggandaan				936,000
5 2 2 06 0002	Belanja Penggandaan				936,000
	- fotocopy	1000	Lembar	250	250,000
	- Penggandaan peta usulan areal kerja	4	Lembar	111,500	446,000
	- jilid laporan akhir kegiatan	8	Buku	30,000	240,000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				4,830,000
5 2 2 11 0004	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				4,830,000
	Makan dan minum pertemuan dengan Keltan/Nagari di KPH dalam rangka fasilitasi penyiapan usulan kemitraan di KPH Bukit Barisan				2,415,000
	- Nasi bungkus	105	bungkus	23,000	2,415,000
	Makan dan minum pertemuan dengan Keltan/Nagari di KPH dalam rangka fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan/kerja HKM, HN, HTR dan kemitraan di KPH Bukit Barisan				2,415,000
	- Nasi bungkus	105	bungkus	23,000	2,415,000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				36,248,000
5 2 2 15 0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				27,720,000
	- Perjalanan dinas dalam rangka fasilitasi penyiapan usulan Kemitraan di KPH				9,240,000
	1. Uang Harian staf KPH Bukit Barisan				6,240,000
	* Uang Harian Eselon III/IV (1 Org/ 2 hr/ 3 kali)	6	OH	500,000	3,000,000
	* Uang Harian Staf Gol III/II/PTT (1 Org/ 2 hr/ 3 kali)	6	OH	360,000	2,160,000
	* Uang Harian Staf Resort (1 Org/ 2 hr/ 3 kali)	6	OH	180,000	1,080,000
	Penginapan				3,000,000
	* Penginapan Eselon III/IV (1 Org/ 1 hr/ 3 kali)	3	OH	600,000	1,800,000
	* Penginapan Staf gol III/II/PTT (1 Org/ 1 hr/ 3 kali)	3	OH	400,000	1,200,000
	- Perjalanan dinas dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan/Kerja HKM, HN, HTR DAN HR Kemitraan				9,240,000
	Uang Harian				6,240,000
	Uang Harian				6,240,000
	* Uang Harian Eselon III/IV (1 Org/ 2 hr/ 3 kali)	6	OH	500,000	3,000,000
	* Uang Harian Staf Gol III/II/PTT (1 Org/ 2 hr/ 3 kali)	6	OH	360,000	2,160,000
	* Uang Harian Staf Resort (1 Org/ 2 hr/ 3 kali)	6	OH	180,000	1,080,000

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Penginapan				3,000,000
	* Penginapan Eselon III/IV (1 Org/ 1 hr/ 3 kali)	3	OH	600,000	1,800,000
	* Penginapan Staf gol III/III/PTT (1 Org/ 1 hr/ 3 kali)	3	OH	400,000	1,200,000
	- Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Usaha HKM, HN, HTR DAN HR Kemitraan				9,240,000
	Uang Harian				6,240,000
	* Uang Harian Eselon III/IV (1 Org/ 2 hr/ 3 kali)	6	OH	500,000	3,000,000
	* Uang Harian Staf Gol III/III/PTT (1 Org/ 2 hr/ 3 kali)	6	OH	360,000	2,160,000
	* Uang Harian Staf Resort (1 Org/ 2 hr/ 3 kali)	6	OH	180,000	1,080,000
	Penginapan				3,000,000
	* Penginapan Eselon III/IV (1 Org/ 1 hr/ 3 kali)	3	OH	600,000	1,800,000
	* Penginapan Staf gol III/III/PTT (1 Org/ 1 hr/ 3 kali)	3	OH	400,000	1,200,000
5 2 2 15 0002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				8,528,000
	- Perjalanan dinas Dalam rangkasinkronisasi dan pengusulan proposal Perhutanan Sosial Ke KLHK				8,528,000
	Uang Harian				2,700,000
	* Uang Harian Eselon III/IV (1 Org/ 3 hr/ 1 kali)	3	OH	900,000	2,700,000
	Penginapan				5,828,000
	* Penginapan Eselon III/IV (1 Org/ 2 hr/ 1 kali)	2	OH	992,000	1,984,000
	Transportasi				3,844,000
	Tiket Pesawat	1	OT	2,952,000	2,952,000
	Taxi Padang	2	OT	190,000	380,000
	Taxi Jakarta	2	OT	256,000	512,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					63,040,000

Padang, 31 Januari 2019
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN


BAMBANG SUYONO, S. Hut, MM
 NIP.19720907 199903 1 002

Lampiran 2 : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyiapan, Pembinaan, dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Tahun Anggaran 2019

Nomor : 522.4/021/KPHL BB-2019

Tanggal : 31 Januari 2019

Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule)

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV
			[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
[1]	[2]	[3]	[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
I.	Persiapan												
	1) Penyiapan dokumen administrasi		Rp. 0,-										
	a. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan												
	b. Pembuatan dokumen Surat Keputusan (SK) penetapan												
	c. Penyusunan dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan												
	2) Penggandaan Dokumen administrasi Kegiatan			Rp -									
	3) Penyiapan bahan pendukung administrasi pelaksanaan kegiatan	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kegiatan		Rp 1,637,000									
		- Penggandaan bahan dan dokumen kegiatan		Rp 62,500		Rp 62,500		Rp 62,500	Rp 62,500		Rp 446,000		
II.	Pelaksanaan												
	1) Fasilitasi penyiapan usulan kemitraan												
		c bahan bakar minyak		Rp 800,000	Rp 400,000								
		- uang harian dan biaya penginapan		Rp 6,160,000	Rp 3,080,000								
		- Transportasi peserta		Rp 5,250,000	Rp 2,625,000								
		- Makan dan Minum Fasilitasi Penyiapan usulan kemitraan		Rp 1,610,000	Rp 805,000								
		- Pembuatan Laporan Fasilitasi penyiapan usulan kemitraan		Rp. 0,-	Rp. 0,-								
	2) Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan/kerja												
		c bahan bakar minyak				Rp 800,000	Rp 400,000						
		- uang harian dan biaya penginapan				Rp 6,160,000	Rp 3,080,000						

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV
			[5]		[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
[1]	[2]	[3]				Rp 5,250,000	Rp 2,625,000						
		- Transportasi peserta											
		- Makan dan Minuman Rapat				Rp 1,610,000	Rp 805,000						
		- Pembuatan Laporan pelaksanaan Pengukuran				Rp 0,-	Rp 0,-						
	3) Pembinaan dan Pengembangan Usaha												
		c bahan bakar minyak						Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 439,000			
		- uang harian dan biaya penginapan						Rp 3,080,000	Rp 3,080,000	Rp 3,080,000			
		- Pembuatan Laporan pelaksanaan Pengukuran						Rp -	Rp -	Rp -			
	4) Sinkronisasi dan pengusulan proposal perhutanan sosial ke kemitraan												
		- uang harian, biaya penginapan dan transportasi										Rp 6,160,000	
		- Pembuatan Laporan pelaksanaan Pengukuran										Rp -	
III.	Pelaporan												
	1) Penyusunan Laporan realisasi kegiatan	- Pembuatan Laporan											
	2) Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan	- Pembuatan Laporan											Rp 0,-
		- Penggandaan Laporan											Rp 240,000

Padang, 31 Januari 2019
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN


BAMBANG SUYONO, S. Hut, MM
 NIP.19720907 199903 1 002